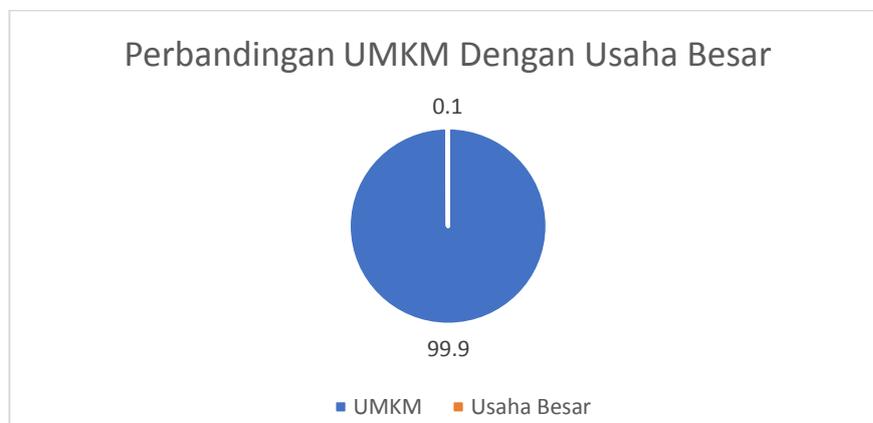


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

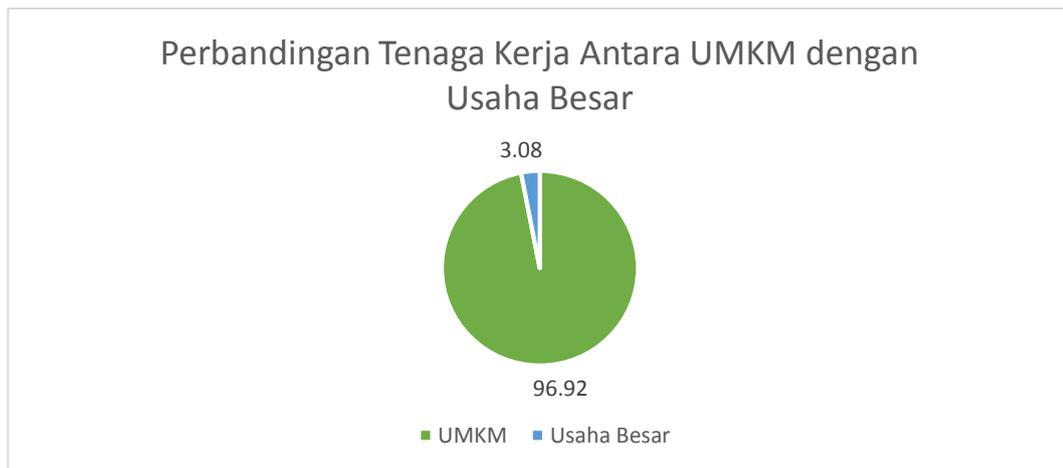
Pandemi Covid 19 telah menghancurkan ekonomi di Indonesia khususnya pada sektor UMKM, pemulihan ekonomi merupakan salah satu jalan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian di negara itu sendiri. Menurut Kementerian Keuangan RI laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3.69 %, ini berdampak baik setelah hancurnya perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang dimana menurut Kementerian Keuangan RI pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar minus 2,07 %. Menurut Kementerian Keuangan RI APBN yang fleksibel dan responsif selama pandemi mampu menjaga keberlanjutan laju pemulihan ekonomi pada tahun 2021, perluasan dan perpanjangan program perlindungan sosial serta dukungan pada sektor usaha dapat menjaga kinerja tetap mampu tumbuh positif.

Pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menjelaskan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.



Gambar 1.1
Perbandingan UMKM Dengan Usaha Besar
Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2019)

Pada gambar 1.1 menggambarkan perbandingan usaha anantara UMKM dengan Usaha Besar dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa unit usaha yang mendominasi yaitu UMKM. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM RI pada tahun 2019 melaporkan bahwa secara unit, UMKM sebanyak 65.465.497 Unit atau 99,9 % dari seluruh pelaku usaha di indonesia. Sementara pada unit Usaha Besar hanya 5.637 atau hanya 0,1 % .



Gamabar 1.2
Perbandingan Tenaga Kerja UMKM dengan Usaha Besar
 Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM (2019)

Pada Gamabar 1.2 menunjukkan jumlah tenaga kerja mendominasi pada sektor UMKM. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM RI pada tahun 2019 melaporkan bahwa tenaga kerja nasional berjumlah 119.562.843 jiwa dengan rician 119.562.843 jiwa pada sektor UMKM atau sebesar 96,92 % dan 3.805.829 pada sektor Usaha Besar atau sebesar 3,08 %. Dengan data tersebut kita mengetahui bahwa unit usaha UMKM sangat banyak, shingga persaingan unit usaha UMKM sangat lah pesat sehingga para pelaku UMKM harus siap dengan persaingan produk UMKM. Yang membuat para pelaku UMKM harus berinovasi dan menciptakan usaha baru untuk mampu bersaing dalam unit usaha UMKM (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2019).

Dalam pemulihan ekonomi di indonesia pada masa pandemi peran UMKM sangat potensial, akan tetapi dalam UMKM pun masih banyak kendala dan masalah. Menurut Sri Handini (2019) Terdapat banyak masalah dalam upaya

mengembangkan UMKM, terutama menyangkut manajemen, produksi dan pemasaran, serta pembiayaan. Berbagai persoalan tersebut muncul akibat sulitnya UMKM dalam mengakses berbagai sumber-sumber ekonomi, di samping tidak banyak kelompok masyarakat yang memiliki komitmen bagi pengembangan UMKM termasuk dalam hal ini adalah mengonsumsi produk yang dihasilkan UMKM. Khususnya dalam keuangan masih menjadi kendala dalam keberlangsungan hidup UMKM, maka dari itu perlu adanya upaya yang maksimal dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. UMKM di negara Indonesia sangatlah tinggi, dikutip dari (Kementerian Keuangan, 2021) Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,1% serta disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01%. Tentu dengan meningkatnya kualitas kinerja khususnya kinerja keuangannya maka pendapatan UMKM akan meningkat.

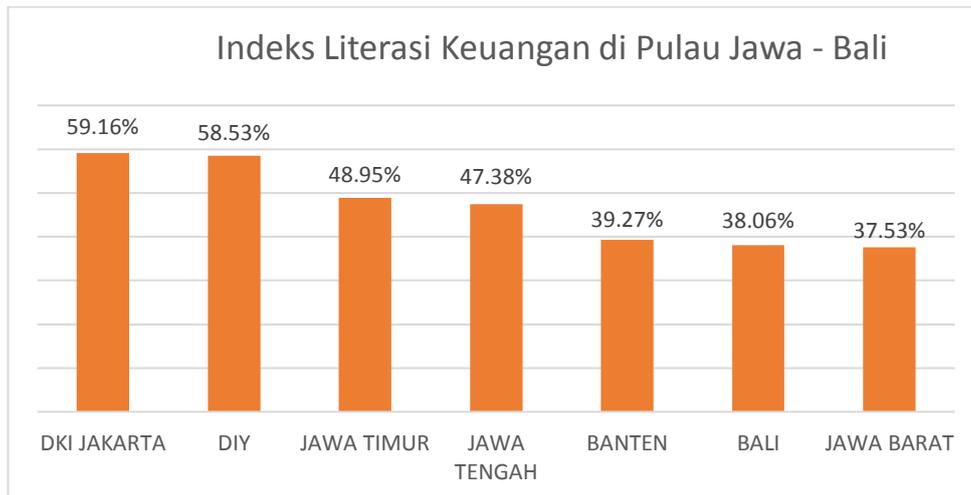
Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan dari beberapa proses yang telah dilalui dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dangnga, 2018:53). Kinerja Keuangan adalah suatu laporan mengenai pengkajian keuangan suatu masyarakat atau badan usaha yang diatur dalam suatu periode tertentu bermaksud untuk mengetahui alur keuangan dalam periode tersebut (Suleman 2019:14). Namun kinerja keuangan UMKM masih tertinggal dibandingkan dengan usaha-usaha yang sudah besar, ini disebabkan karena kurangnya akses UMKM terhadap sumber daya finansial, sehingga menyebabkan keterhambatan kemajuan UMKM dalam sumber daya finansial. Oleh karena itu UMKM memerlukan bantuan lembaga keuangan yaitu perbankan, tetapi dalam perbankan tersendiri banyak kendala terutama banyaknya prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh pelaku UMKM dan prosedur-prosedur tersebut sangat menyulitkan pelaku UMKM. Kesulitan prosedur tersebut dirasakan oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari bank, pihak bank tersendiri mengharuskan adanya aset sebagai jaminan. Dikarenakan mayoritas para pelaku UMKM tidak memiliki suatu aset yang bisa dijadikan jaminan, maka para pelaku UMKM menggunakan modalnya sendiri untuk keberlangsungan usahanya, tidak sedikit yang akhirnya kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena kesulitan dalam permodalan,

sehingga banyak para pelaku UMKM tidak bisa melanjutkan kembali usahanya dan terpaksa bangkrut.

Pemerintah telah berupaya membuat beberapa program untuk memajukan kehidupan UMKM, menurut (Kementerian Keuangan, 2021) pemerintah juga menyiapkan berbagai program lainnya untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Diharapkan dengan adanya program-program dari pemerintah menumbuhkan motivasi bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, tetapi kenyataan dilapangan para pelaku usaha kerap kali kesulitan untuk mengembangkan usahanya selain masalah mengenai akses terhadap layanan finansial, pemasaran ataupun teknologi. Namun para pelaku UMKM dihadapkan dengan kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, maka dari itu literasi keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha.

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2017). Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa para pelaku UMKM tidak hanya mengetahui dan memahami tentang produk-produk jasa keuangan tetapi dapat juga meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan sehingga pengelolaan keuangan akan efektif dan efisien.

Survei nasional mengenai literasi keuangan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan memberikan keterangan bahwa literasi keuangan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017, yang dimana pada tahun 2016 tingkat literasi keuangan di Indonesia sebesar 29,7% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 38,03% (OJK, 2020).



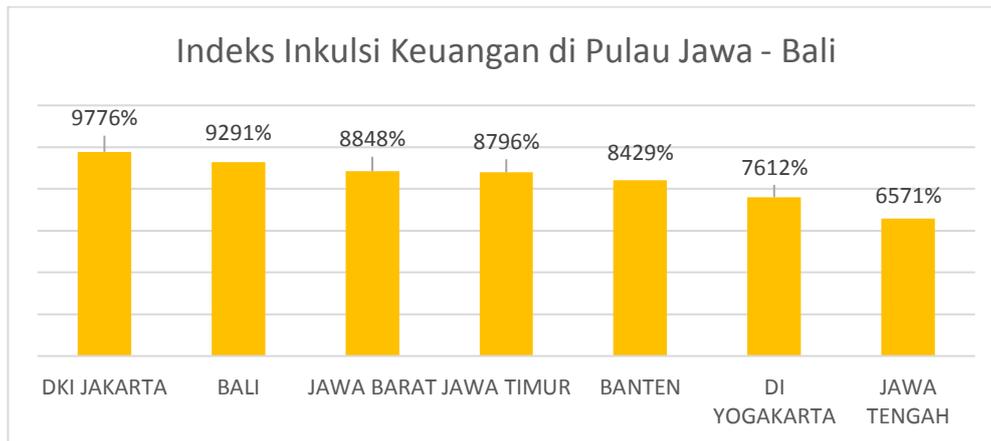
Gambar 1.3

Indeks Literasi Keuangan di Pulau Jawa - Bali

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Pada gambar 1.3 menjelaskan bahwa tingkat literasi keuangan di provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 memiliki tingkat literasi yang sangat rendah dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa-Bali yaitu sebesar 37,53%. Tetapi Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 38,03% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang *well literate*. (OJK, 2020). Bila merujuk pada data indeks literasi keuangan tahun 2019 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk, terdapat sekitar 62 orang yang belum memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan formal.

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2017). Secara sederhana, inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Hasil survey mengenai indeks inklusi keuangan pada tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar 76,16%, artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 76 orang yang inklusif atau mempunyai akses terhadap layanan jasa keuangan.



Gambar 1.4

Indeks Inklusi Keuangan di Pulau Jawa – balli

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat memiliki inklusi keuangan sebesar 88,48 %. Jika dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan pada provinsi Jawa Barat, ini sangat bebanding terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak mampu mengikuti inklusi keuangan yang dapat diasumsikan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang mengakses dan mampu menggunakan layanan keuangan namun tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan terhadap layanan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengukuran pada kondisi inklusi keuangan melalui SNLIK sejak tahun 2013 hingga tahun 2019. Parameter dalam indeks inklusi keuangan adalah penggunaan produk jasa keuangan dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan data penelitian yang diterbitkan oleh OJK, terjadi peningkatan indeks inklusi keuangan, semula pada tahun 2013 sebesar 59,7 %, pada tahun 67,8 % dan pada tahun 2019 sebesar 76,16 %. Hasil indeks inklusi keuangan tahun 2019 melampaui target pemerintah yang dicanangkan pada Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dimana target indeks inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2019. (OJK, 2020)

Untuk pengaplikasian terhadap pemahaman mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan maka para pelaku UMKM harus memahami dasar-dasar mengenai manajemen keuangan sebagai pedoman untuk berinvestasi didalam

usahanya. Manajemen keuangan berkaitan disiplin ilmu keuangan yang memperhatikan dua hal pokok yaitu penilaian dan pengambilan keputusan, dua hal tersebut mewarnai manajemen keuangan dimana dua fungsi saling berkaitan karena keputusan investasi perusahaan tergantung pada penilaian oleh pihak yang menilai (Suleman, 2019:1). Walaupun ada kesamaan dengan akuntansi dalam hal memfokuskan perhatian pada aktiva dan passive perusahaan namun berbeda dengan akuntansi yang penekannya pada aspek tinjauan dari apa yang sudah terjadi melihat pada laporan keuangan dan mempertanggung jawabkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Sebaliknya manajemen keuangan penekannya pada pembuatan keputusan lebih memfokus pandangan pada masa depan (Suleman, 2019:19).

Keputusan investasi dalam penelitian ini dapat menjadi mediasi antara literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2019) menyebutkan bahwa keputusan investasi mampu menjadi mediasi antara kinerja keuangan dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Hidayatullah (2022) menyebutkan semakin tinggi tingkat Literasi dan inklusi maka semakin tinggi keputusan investasi dan semakin tinggi tingkat keputusan investasi maka semakin tinggi laba yang diperoleh. Dimana tingkat laba merupakan indikasi bahwa kinerja keuangan tersebut baik.

Peningkatan kualitas keuangan UMKM masih perlu dilakukan agar dapat meningkatnya kualitas dalam pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan karangpawitan. Dengan peningkatan kualitas kinerja keuangan UMKM maka perlu adanya pembinaan dalam menunjang kinerja keuangan UMKM dengan cara memberikan pemahaman literasi keuangan, inklusi keuangan dan keputusan investasi, terutama untuk para pelaku UMKM pada kategori Usaha Mikro.

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, keputusan investasi dan kinerja keuangan dapat menjadi modal untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi resiko yang terjadi dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Umkm Di Kecamatan Karangpawitan Pada Masa New Normal”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, terdapat masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kinerja keuangan UMKM yang disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan, selain itu rendahnya tingkat keputusan investasi oleh pelaku UMKM yang menyebabkan tidak meningkatnya kinerja keuangan pada sektor UMKM. Maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana literasi keuangan, inklusi keuangan, keputusan investasi dan kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan ?
2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi UMKM di Kecamatan Karangpawitan ?
3. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap keputusan investasi UMKM di Kecamatan Karangpawitan ?
4. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan?
5. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan?
6. Bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan ?
7. Bagaimana keputusan investasi memediasi hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, terdapat tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut :

1. Literasi keuangan, inklusi keuangan, keputusan investasi dan kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan

2. Pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi UMKM di Kecamatan Karangpawitan
3. Pengaruh inklusi keuangan terhadap keputusan investasi UMKM di Kecamatan Karangpawitan
4. pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan
5. pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan
6. Pengaruh keputusan investasi terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan
7. keputusan investasi menjadi mediasi antara literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yang diharapkan penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman tentang literasi keuangan, inklusi keuangan dan kinerja keuangan UMKM.
2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk kebijakan dan merancang strategi dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Serta mengevaluasi apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah sudah sesuai target yang ingin dicapai atau masih perlu menambah langkah untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan serta kinerja keuangan UMKM.
3. Bagi Pelaku UMKM
Penelitian ini diharapkan memberikan dorongan kepada perusahaan untuk mengedukasi para pelaku usaha agar semakin memahami dan mampu

menggunakan layanan keuangan yang ada dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada UMKM Khususnya pada Usaha Mikro di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Kecamatan Karangpawitan merupakan kecamatan terbesar kedua di Kabupaten Garut setelah Kecamatan Malangbong dengan jumlah 4 kelurahan dan 16 Desa. Kecamatan Karangpawitan menjadi pusat industri maupun agribisnis peternakan. Letak Kecamatan Karangpawitan sangatlah strategis karena berdekatan dengan pusat kota garut yaitu Kecamatan Garut Kota dan dekat dengan beberapa objek wisata di Kabupataen Garut. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut yaitu

- 1) Persaingan UMKM di Kecamatan Karangpawitan sangatlah ketat
- 2) Beragamnya jenis produk UMKM yang produksi
- 3) Di Kecamatan Karangpawitan menjadi sentra industri Kabupaten Garut.

2. Jadwal Penelitian

Dalam Penelitian ini penelitian berlangsung selama 6 bulan sesuai dengan SK. Maka unuk jadwal penelitian tersendiri terlampir pada lampiran 1.